

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 di Indonesia mulai bermunculan pada 12 Maret 2020 yang bukan hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yaitu dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga bernilai negatif pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada sektor UMKM, dampak dari pandemi Covid-19 sangat dapat dirasakan, untuk itu cara dalam menekan penyebaran virus tersebut bagi pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kemudian juga dikeluarkan pada tahun 2021 kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam 2 bentuk yaitu Mikro dan Darurat. Munculnya kebijakan tersebut membuat para pelaku UMKM mengalami kesulitan memasarkan produk sehingga berpengaruh terhadap omzet yang didapatkan.

Peran pemerintah tentu sangatlah dibutuhkan agar perekonomian Indonesia dapat kembali pulih terutama sektor UMKM yang merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Bentuk respon pemerintah untuk pemulihan terhadap perekonomian sektor UMKM yaitu pemberian insentif UMKM melalui suatu bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat pada tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan lagi tahun 2021. Selain itu bentuk sokongan dari pemerintah terhadap para pelaku UMKM yaitu melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk on board ke platform digital. Dorongan melalui platform digital tersebut diharapkan bisa untuk memberikan peningkatan efisiensi dan memberikan penambahan dalam saluran penjualan/pemasaran sektor UMKM. (bkpm.go.id)

Berdasarkan hasil survey dari Lembaga survey dalam halnya seperti World Bank, BPS, dan Bappenas yang pada hasilnya mmeberikan gambaran bahwa dampak

yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terutama pada UMKM yaitu diantaranya: Banyak yang tidak dapat membayar tagihan listrik, gas, memiliki hambatan dalam melunasi pinjaman hutang, serta gaji karyawan tidak dapat dibayarkan yang menyebabkan beberapa diantaranya saat itu harus mengalami pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Hal lain yang menjadi kendala pada UMKM dimasa pandemi Covid-19 yaitu adalah dalam masalah permodalan, bahan baku, penurunan jumlah pelanggan, serta proses produksi dan distribusi terhambat. Dengan adanya pembatasan kegiatan tentunya perilaku konsumen berubah serta kompetisi bisnis alurnya akan berubah dibanding sebelumnya, dikarenakan konsumen cenderung lebih banyak memakan waktu dirumah dan memilih berbelanja secara digital, dan untuk perubahan kompetisi bisnis disebutkan disini ada 4 ciri khas yaitu Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility (CNBC Indonesia, 28 April 2021).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah diantaranya merasakan bagaimana dampak dari pandemi Covid-19 terutama pada UMKM. Diketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki UMKM sejumlah kisaran 593.100 unit yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan, kehutanan, pertambangan, perikanan, komunikasi, hotel, pengolahan bangunan, restoran, jasa, dan lain – lain. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM saat masa pandemi ini yaitu diantaranya bahan baku sulit, terhambatnya proses distribusi, menurunnya penjualan, sistem produksi terhambat, dan masalah permodalan (Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, 2020:10)

Pada Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebuah kota kecil yaitu Kota Padang Panjang yang mengalami permasalahan penurunan laju pertumbuhan perekonomian saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dipaparkan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,71%, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,56%, dan tahun 2020 sebesar -1,44%. (BPS Kota Padang Panjang)

UMKM pada Kota Padang Panjang tahun 2020 sejumlah 12.444 usaha (lampiran 1) sektor UMKM terbanyak adalah sektor perdagangan mencapai 6.645

unit usaha dan yang paling sedikit berada pada sektor jasa wisata yaitu hanya terdapat 2 unit usaha yang tercatat dalam Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang. Pada kondisi itu, terlihat sekali pada tiap sektor UMKM yang berada pada golongan kelas menengah kebawah yang dapat dikatakan merasakan dampak yang sangat atau cukup besar dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Agar para pelaku UMKM masih terus bisa melanjutkan usahanya dan kembali pulih maka sangat diperlukannya peranan melalui dinas perindustrian dan perdagangan. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berperan melakukan pemberdayaan terhadap UMKM untuk meningkatkan kembali pendapatan serta omset UMKM tersebut. Sementara faktanya dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat No: 050/07.a/SK-DISPERINDAG/V/2018 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa pengembangan industri sesuai potensi daerah belum optimal. Adapun bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindag adalah pendirian workshop dan pelatihan UMKM sektor industri kulit dan alas kaki di Kota Padang Panjang. Sehingga, Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai peranan mendalam tentang peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang dalam memberdayakan UMKM di Kota Panjang Panjang.

Terkait dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul “Peran Disperindag dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang Panjang Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang disusun peneliti berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dari Disperindag Kota Padang Panjang dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang Panjang pada saat masa pandemi Covid-19?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh UMKM disaat pandemic Covid-19 berlangsung di Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap aspek finansial, pemasaran, sumber daya manusia, dan strategi pengaturan dan pengendalian UMKM di Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengetahui Peran Disperindag Kota Padang Panjang dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang Panjang pada saat masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh UMKM saat pandemic Covid-19 berlangsung di Kota Padang Panjang.
3. Mengetahui dampak pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap aspek finansial, pemasaran, sumber daya manusia, dan strategi pengaturan dan pengendalian UMKM di Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hal ini dapat dijadikan salah satu bentuk landasan dalam pengambilan kebijakan, serta diharapkannya dapat memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan suatu bentuk kebijakan yang cermat dalam peningkatan perannya melalui Disperindag Padang Panjang dengan cara memberdayakan UMKM tersebut

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hal ini dapat dijadikan sebaagai pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti selanjutnya dan dapat pula menambah kajian mengenai peran Disperindag Kota Padang Panjang dalam memberdayakan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat akademik yang harus diselesaikan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan gelar sarjana S1 jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan dapat menambah wawasan dengan judul terkait.

